

## ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Salah satu bentuk penggelapan yang sering terjadi adalah penggelapan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor yang digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang menerima gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemilik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 372 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta aspek non yuridis seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor tanpa izin pemilik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana Penggelapan, Sepeda Motor, Gadai Tanpa Izin, Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.**

## ABSTRACT

*Embezzlement is a common form of property crime. Embezzlement occurs when someone intentionally and unlawfully appropriates another person's property, which is not under their control through a crime. One common form of embezzlement is the embezzlement of motor vehicles, particularly motorcycles pawned to another party without the permission of the rightful owner. This act not only harms the vehicle owner but can also cause losses to the other party receiving the pawn. This study aims to identify and analyze the legal provisions regarding the crime of embezzlement of motorcycles pawned without the owner's permission and to identify and analyze the judge's considerations in deciding the case based on Decision Number 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.*

*The research method used in this study is normative legal research using a statutory and case-based approach. The data sources used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books, journals, and legal literature related to the research, and tertiary legal materials supporting the research. Data collection was conducted through library research, while data analysis was conducted qualitatively.*

*The results of the study indicate that pawning another person's motorcycle without the owner's permission fulfills the elements of embezzlement as stipulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP). In Decision Number 1446/Pid.B/2025/PN Mdn, the judge declared the defendant legally and convincingly proven guilty of embezzlement based on the facts revealed at trial, the evidence presented, and the fulfillment of the elements of the offense under Article 372 of the Criminal Code. The judge's considerations in issuing the verdict were based on legal aspects, namely the fulfillment of the elements of the crime, as well as non-legal aspects such as aggravating and mitigating circumstances.*

*Based on these research results, it can be concluded that pawning a motorcycle without the owner's permission is an unlawful act that can be classified as embezzlement. The judge's decision in this case complies with applicable criminal law.*

***Keywords: Legal Analysis, Criminal Act of Embezzlement, Motorcycle, Unauthorized Pawning, Decision Number 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.***